

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
3251/B/PK/Pjk/2022)**

DIEN HANIFA

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Tlp. 021-7656971
E-mail: dien.hanifa@gmail.com

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber APBN terbesar bagi Indonesia. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi peraturan perpajakan banyak yang masih abu-abu atau *grey area* yang menimbulkan perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hal ini sering terjadi di pemeriksaan pajak, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa dibidang perpajakan yang diselesaikan melalui pengadilan pajak. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai putusan pengadilan pajak dan putusan mahkamah agung yang berbeda dalam satu perkara sengketa yang sama, yaitu perkara sengketa pajak pertambahan nilai agunan yang diambil alih. Dalam penulisan ini akan dibahas pertimbangan majelis hakim pengadilan pajak sampai putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini perbedaan putusan majelis pada pengadilan pajak dan mahkamah agung disebabkan kedua pengadilan tersebut memakai metode interpretasi yang berbeda. Pengadilan pajak menggunakan metode interpretasi gramatikal, sedangkan Mahkamah Agung menggunakan metode interpretasi restriktif. Dan Agunan yang diambil alih oleh kreditur terutang PPN sesuai dengan UU PPN, karena di UU PPN tidak menyebutkan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur merupakan *negative list* PPN atau non objek PPN.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Agunan Yang di ambil Alih, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung

**CONSIDERATIONS OF THE COUNCIL OF JUDGES OF THE
SUPREME COURT AND TAX COURT IN THE VALUE ADDED
TAX CASES OF FOREIGNED COLLATERALS
(STUDY OF SUPREME COURT NUMBER 3251/B/PK/Pjk/2022)**

ABSTRACT

Tax revenue is the largest source of the APBN for Indonesia. Tax collection is coercive because it is based on applicable laws and regulations, however many tax regulations are still gray areas which give rise to differences of opinion between taxpayers and tax officers. This often happens in tax audits, which ultimately gives rise to disputes in the field of taxation which are resolved through the tax court. In this research, we will discuss different tax court decisions and supreme court decisions in the same dispute case, namely the value added tax dispute over repossessed collateral. In this article, we will discuss the considerations of the tax court panel of judges until the decision was overturned by the Supreme Court. This research method uses a normative legal research method with a statutory regulation approach. The results of this research are differences in the panel's decisions at the tax court and the supreme court because the two courts use different interpretation methods. The tax court uses a grammatical interpretation method, while the Supreme Court uses a restrictive interpretation method. And the collateral taken over by the creditor is subject to VAT in accordance with the VAT Law, because the VAT Law does not state that the handover of collateral taken over by the creditor is on the VAT negative list or non-VAT object.

Keywords: *Value Added Tax, Collateral Taken Over, Tax Court, Supreme Court*